

SKRIPSI
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



Oleh :

MHD ICHWAN CAHYADI
10873003075

JURUSAN AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2012

ABSTRAK

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Oleh : Mhd Ichwan Cahyadi
10873003075

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan Kabupaten termuda di Propinsi Riau. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan Daerah.

Penelitian ini menggunakan Analisis Rasio Keuangan yang terdiri dari Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan dengan membandingkan praktek dan teori yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berada di kriteria Sangat Kurang.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4 Metode Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pemerintah Daerah.....	12
2.2 Keuangan Daaerah	14
2.3 Pengertian Akuntansi Syariah.....	15
2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	17
2.5 Pengertian dan Tujuan Analisis Rasio Keuangan.....	23
2.6 Jenis Rasio Keuangan Daerah.....	25
BAB III GAMBARAN UMUM	
3.1 Sejarah Singkat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	32
3.2 Potensi Ekonomi	33
3.3 Bagian- Bagian Keuangan Daerah.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitan	42
4.2 Pembahasan.....	55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	
	Tahun Anggaran 2010 dan 2011	7
Tabel 2.1	Skala Interval Kemampuan Keuangan Daerah	25
Tabel 2.2	Kriteria Kinerja Keuangan Efektifitas.....	26
Tabel 2.3	Kriteria Kinerja Keuangan Efisiensi	28
Tabel 2.4	Skala Interval Rasio Belanja Pembangunan.....	29
Tabel 4.1	Gambaran Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten	
	Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2010	43
Tabel 4.2	Gambaran Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten	
	Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011	44
Tabel 4.3	Skala Interval Rasio Kemampuan Daerah	45
Tabel 4.4	Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten	
	Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2010	46
Tabel 4.5	Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten	
	Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011	46
Tabel 4.6	Kriteria Kinerja Keuangan Efektivitas	47
Tabel 4.7	Biaya yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD Pemerintah Daerah	
	Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2010.....	49

Tabel 4.8	Biaya yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011.....	50
Tabel 4.9	Kriteria Kinerja Keuangan Efisiensi	50
Tabel 4.10	Gambaran Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2010	51
Tabel 4.11	Gambaran Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011	51
Tabel 4.12	Skala Interval Rasio Belanja Pembangunan.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu agenda reformasi total di Indonesia adalah terciptanya *good governance* secara menyeluruh dalam rangka membentuk Indonesia baru. Harus diakui bahwa saat ini *good governance* sudah menjadi tuntutan bagi bangsa Indonesia. Salah satu agenda reformasi yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah reformasi manajemen keuangan sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance* di dalam pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah

Sehubungan dengan adanya reformasi, pemerintah telah mengeluarkan dua undang–undang yang sangat penting artinya dalam sistem pemerintahan pusat, daerah, dan dalam sistem hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kedua undang–undang tersebut adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah, telah diubah menjadi UU No. 32 dan 33 tahun 2004. Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi dalam usaha pembangunan perlu dilakukan secara terencana dan sistematis sehingga pemberian otonomi dan desentralisasi di bidang keuangan perlu ditempuh agar usaha pembangunan dapat dilakukan secara efisien dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Salah satu instrument yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh kemampuan daerah di dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan kegiatan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah melalui

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai rencana pembangunan daerah yang dituangkan dalam bentuk angka, masyarakat atau publik merupakan pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan anggaran daerah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum bagi masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya. Penyelenggaraan anggaran daerah memang tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pihak eksekutif, namun harus merupakan suatu kebersamaan antara eksekutif, legislatif dan masyarakat dalam arti luas (meliputi perwakilan dari warga, pemuka adat, tokoh masyarakat, kalangan akademisi dan LSM). Kesadaran bahwa penyelenggaraan anggaran daerah merupakan amanat rakyat menjadi sangat penting bagi terwujudnya akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan keuangan daerah.

Untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya antara lain dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan ini terdiri sebagai berikut :

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh

besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman dan lain-lain yang bersifat bukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Widodo, 2001 : 262).

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian: } \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber ekstern, Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintahan pusat) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio keuangan juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

b. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

1. Rasio Efektifitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Abdul Halim, 2002 : 177)

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target penerimaan PAD berdasarkan potensi riil}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah resiko yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara hemat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatannya kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterima. (Abdul Halim, 2002 : 178)

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}}$$

c. Rasio Aktivitas

Rasio yang mengukur antara alokasi dana belanja rutin (Belanja Tidak Langsung) dan belanja pembangunan (Belanja Langsung) secara optimal. Rasio Belanja Pembangunan ditunjukkan oleh total belanja Pembangunan dibandingkan dengan total dari APBD Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat akan semakin besar. Secara sederhana rasio ini dapat diformulasikan sebagai berikut (Widodo, 2001 : 262) :

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} : \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Rutin} : \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai komponen penyusun APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, total pendapatan, belanja rutin dan belanja pembangunan (Widodo, 2001 : 270):

Rumus yang digunakan adalah :

$$r : \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n : Data yang dihitung pada tahun ke-n

P_o : Data yang dihitung pada tahun ke-0

r : Pertumbuhan

Penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan :

1. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintahan daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial.
2. Selama ini penyusunan APBD sebagian masih dilakukan berdasarkan perimbangan *incremental budget* yaitu besarnya masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan meningkatkan sejumlah persentase tertentu. Oleh karena itu sering mengabaikan rasio keuangan dalam APBD.
3. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD nya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah kabupaten termuda di propinsi Riau, banyak masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti berasumsi bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti tidak memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar untuk membiayai APBD nya apabila disahkan menjadi sebuah Kabupaten, oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan untuk mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya kinerja keuangan di Kabupaten

Kepulauan Meranti. Berikut adalah Realisasi APBD pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2010 dan 2011 dapat dilihat di dalam tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1
Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun anggaran 2010 dan 2011
(dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah
2010	507.147.876.196	368.699.036.594
2011	868.241.811.212	817.740.061.027

Sumber Data : APBD Kabupaten Kepulauan Meranti

Dari tabel 1.1 diketahui Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010 sebesar Rp. 507.147.876.196 dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Sebesar Rp. 368.699.036.594 . Realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 868.241.811.212 dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Sebesar Rp. 817.740.061.027. Dari angka–angka realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2010 dan 2011 dapat diketahui analisis terhadap kinerja keuangannya secara detail, untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan dengan menggunakan rasio–rasio keuangan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimana kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan meranti.”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang analisis kinerja keuangan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Bagi Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Meranti, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menilai kinerja keuangan.
- c. Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada kantor Bupati dan kantor Dinas Pendapatan, Keuangan Daerah dan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang.

2. Jenis dan sumber data.

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berupa Laporan Perhitungan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2010 dan 2011, Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, serta struktur organisasi Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan berasal dari kantor Bupati dan kantor Dinas Pendapatan, Keuangan Daerah dan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi pustaka

Pengumpulan data melalui studi pustaka yaitu dengan mengkaji buku untuk memperoleh landasan teori yang kuat dan menyeluruh tentang pembahasan.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi, yaitu pengambilan data pada kantor Bupati dan kantor Dinas Pendapatan, Keuangan Daerah dan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang.

4. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis rasio keuangan daerah, yaitu dengan meneliti dan membahas data yang ada, kemudian menganalisis serta membandingkan praktek dengan teori yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara keseluruhan dan memudahkan memahami isi penelitian ini, maka penulis membagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini memuat uraian teoritis mengenai pengertian Keuangan Daerah, analisis Rasio dan jenis rasio keuangan daerah. Selain itu juga membahas pengertian akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah, hubungan akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan tentang gambaran umum pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Meranti

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan kondisi rasio keuangan pada bagian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran untuk pihak yang terkait.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi (Pasal 1 butir 2 UU 32/04), kemudian otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 butir 5 UU 32/04).

Berbagai argumen dan teori menyatakan, mengapa pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah kabupaten/kota menjadi sangat penting, dikarenakan :

- a. semakin langkanya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan
- b. Mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan (Andrew dan Mac Colin, 2001: 3)

Pelaksanaan otonomi daerah selama ini, sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 mengarah kepada prinsip bahwa pelaksanaan asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi. Berlangsung secara bersamaan dua asas pemerintah tersebut yaitu dekonsentrasi dan desentralisasi ini mengartikan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab mutlak atas pertumbuhan ekonomi di daerah. (Koswara, 2000 : 14). Ini berarti,

pertama, ada urusan pemerintahan dan pembangunan yang sifatnya nasional yang tidak diserahkan kepada daerah, baik dalam bentuk otonomi maupun tugas pembantuan. Urusan pembangunan tersebut tetap dikelola oleh pusat atau pejabat perwakilan pusat di daerah. kedua, pelaksanaan asas dekonsentrasi merupakan jalur intervensi dan pengawasan secara langsung oleh pemerintah pusat terhadap urusan yang sudah diserahkan dan menjadi hak, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Berbeda dengan konsep otonomi daerah, yang dianut oleh undang-undang UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 yang menghendaki pelaksanaan asas desentralisasi secara penuh Kepada daerah/kabupaten/kota, kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, pengadilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa bidang kebijakan pemerintahan yang bersifat strategis.

Visi dan konsep otonomi daerah menurut Gaffar dkk (2002 : 173) dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama yaitu :

- a. Bidang politik, karena otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokrasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis.
- b. Bidang ekonomi, otonomi daerah disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional didaerah, dan dipihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi daerahnya.
- c. Bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial.

2.2 Keuangan Daerah

Untuk penyelenggaraan tugas–tugas pemerintahan di daerah harus didukung dengan keuangan yang cukup, dalam pasal 79 Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999, yang menjadi sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah, Yaitu :

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

2. Dana Perimbangan

a. Dana Bagi Hasil

1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah meliputi 16,2% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, 64,8% untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota, dan 9% untuk biaya pemungutan. Sedangkan 10% bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbang sebesar 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota, dan sebesar 35% dibagikan sebagai intensif kepada daerah Kabupaten dan Kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTP sebesar 80% dengan rincian 16% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, dan 64% untuk daerah Kabupaten dan Kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan 20% bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTP dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Kabupaten dan Kota.

3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 merupakan bagian daerah adalah sebesar 20% yang dibagi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dimana 60% untuk Kabupaten/Kota dan 40% untuk Provinsi.

4) Kehutanan

Penerimaan dari sektor Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah dan 60% untuk daerah. Sedangkan penerimaan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbalan sebesar 60% untuk Pemerintah dan 40% untuk daerah.

5) Pertambangan Umum

Dana Bagi Hasil dari penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah.

6) Perikanan

Dana Bagi Hasil dari penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk seluruh Kabupaten dan Kota.

7.) Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dengan imbangan 84,5% untuk Pemerintah dan 15,5% untuk daerah. Dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah sebesar 15% dibagi dengan imbangan 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

8.) Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dibagi dengan imbangan 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk daerah. Dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah sebesar

30% dibagi dengan imbalan 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota dalam provinsi bersangkutan. Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

9) Pertambangan Panas Bumi

Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah. Dana bagi hasil dari penerimaan pertambangan panas bumi yang dibagikan kepada daerah dibagi dengan imbalan 16% untuk Provinsi yang bersangkutan, 32% untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 32% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah, proporsi yang diberikan kepada daerah minimal sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri neto.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah

1. Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi / prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer.
 2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak sedikit biaya yang diperlukan dalam proses penganggaran, dalam hal tersebut, Kast dan Rosenzweig (2008 : 462) mengemukakan :

Setidaknya harus ada perimbangan antara biaya produksi dengan hasil usaha. Pentingnya keuangan dalam organisasi ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan yang diperlukan dalam proses produksi dengan kondisi berimbang

Pengertian keuangan daerah menurut Arifin Sabeni (2003 : 13) :

Keuangan Negara (Daerah) adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Revrison Baswir (2003 : 13) juga memberikan definisi tentang keuangan daerah yaitu :

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut, yang dapat dinilai dengan uang.

Berdasarkan pendapat di atas berarti besarnya biaya yang diperlukan harus diimbangi dengan sumber pendapatan/penerimaan sendiri. Ini menunjukkan bahwa organisasi harus mempunyai manajemen pengelolaan keuangan yang dapat memainkan peran dalam menggali sumber-sumber pendapatan atau mampu mengelola sumber pembiayaan dengan seefisien mungkin. Dengan demikian semua persoalan dapat diatasi secara ekonomis, efisien dan efektif.

2.3 Pengertian Akuntansi Menurut Syariah

Suatu pencatatan transaksi dalam suatu perusahaan atau suatu unit ekonomi lain yang menyangkut penyusunan berbagai laporan periodik dari catatan tersebut sesuai dengan syariat Islam. Laporan-laporan itu yang sifatnya umum ataupun khusus memberikan informasi yang berguna kepada para manajer pemilik kreditur ataupun debitur, lembaga pemerintah dan masyarakat umum yang penting adalah semua pencatatan tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah

(berdasarkan Al – Qur'an dan hadist) serta prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.

Akuntansi dalam perspektif Islam juga berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi-transaksi dan penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban (Rifqi Muhammad, 2008 : 10)

Akuntansi menurut perspektif syariah dalam melakukan pencatatan urusan yang diterangkan dalam surah al- baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,

maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian dan Tujuan Anggaran

Anggaran merupakan satu instrumen penting di dalam manajemen karena merupakan bagian dari fungsi manajemen. Di dunia bisnis maupun di organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin. Bahkan, di akuntansi pemerintahan dibuat pencatatan anggaran, mengingat anggaran adalah bagian penting dalam aktivitas pemerintahan.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi.

Menurut Elmi dalam Bukunya “ Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi Di Indonesia “(2007 : 16), bahwa penganggaran adalah :

Penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Masing-masing kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu.

Berdasarkan pernyataan diatas, definisi anggaran dapat diringkas menjadi :

- a. Rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja
- b. Gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk pembangunan
- c. Alat pengendalian
- d. Instrumen publik
- e. Disusun dalam periode tertentu.

Tujuan anggaran yaitu merencanakan dan mengatur berapa rupiah yang akan dikeluarkan dalam satu periode tahun anggaran. Dan tujuan anggaran yang lain yaitu merinci dari mana diperoleh penerimaan dan untuk apa pengeluaran dilakukan. (Arifin Sabeni, 2003 : 39)

2. Fungsi Anggaran

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut :

- a. Anggaran sebagai alat perencanaan
 1. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan misi dan visi yang telah ditetapkan.
 2. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
 3. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
 4. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

b. Anggaran sebagai alat pengendalian

1. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan.
2. Menghitung selisih anggaran.
3. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan atas suatu varians.
4. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

d. Anggaran sebagai alat politik

Dipemerintahan anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Anggaran pemerintah yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

Disamping itu anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa hasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

g. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

Dalam penganggaran publik, masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.(Mardiasmo,2003 :69)

3. Prinsip – Prinsip Penyusunan APBD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105/2000 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka prinsip–prinsip yang harus dipenuhi meliputi :

a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Berarti APBD harus dapat memberikan informasi tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.

b. Disiplin Anggaran

Penyusunan APBD berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat sehingga anggaran

yang disusun harus berlandaskan pada azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan.

c. Keadilan anggaran

Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaan pajak dan retribusi secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat tanpa ada diskriminasi.

d. efisiensi dan efektifitas.

Anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik–sebaiknya untuk peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

e. Format anggaran

APBD disusun berdasarkan format anggaran yang defisit. Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.

f. Rasional dan terukur

Berarti bahwa dalam aspek pengeluaran mengandung semangat untuk melakukan penghematan.

g. Pendekatan kinerja

Berarti kualitas kinerja aparatur seharusnya menjadi acuan utama dalam menentukan besar kecilnya alokasi anggaran.

h. Dokumen publik

APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) dan merupakan dokumen daerah.

4. Penyusunan dan Bentuk Anggaran Dan belanja Daerah

Proses penyusunan anggaran diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh pihak eksekutif maupun legislatif. Hal-hal yang dihasilkan dari penjaringan aspirasi masyarakat ini kemudian di formulasikan oleh masing-masing pihak. Pihak eksekutif di samping memperhatikan hasil penjaringan aspirasi, harus pula mempertimbangkan kebijakan yang berskala nasional serta penjabaran tahunan dalam Renstrada. Selain itu, eksekutif juga harus mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya juga kapasitas daerah dalam daftar arah dan kebijakan umum daerah, yang kemudian dibahas bersama-sama dengan legislatif untuk mencapai kesepakatan. Setelah daftar tersebut disetujui oleh kedua belah pihak, maka jadilah ” Arah dan kebijakan Umum Daerah ” sebagai dokumen Rencana Tahunan Daerah (Retada) untuk tahun yang akan datang . Dengan dasar dokumen itu, penjabaran retada tersebut disusun kedalam dokumen ‘Strategi dan Prioritas’ sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja yang dijabarkan dalam bentuk rupiah dalam APBD. Dengan demikian, masing –masing Satuan Kerja sekarang dapat menyusun “Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)” yang dulu dikenal dengan istilah DUKDA/DUPDA RASK ini merupakan usulan program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja.

Setelah kompilasi atas seluruh RASK dilakukan oleh Tim Anggaran Eksekutif, maka daftar RAPBD disusun guna dibahas dieksekutif dengan seksama. Hasilnya adalah berupa RAPBD yang disampaikan kepada DPRD untuk dibahas. Sebelum membahasnya, DPRD wajib mensosialisasikan RAPBD tersebut kepada

masyarakat untuk mendapatkan masukan langsung. Masukan–masukan ini, dapat berasal dari LSM, mantan pejabat daerah atau mantan anggota DPRD, dari Kalangan universitas, kemudian di dokumentasikan dan ditata dengan rapi dan dilampirkan pada Perda tentang APBD. Beberapa lama sosialisasi berlangsung diserahkan kepada daerah masing–masing, sesuai dengan aspirasi yang berkembang di daerah yang bersangkutan. Setelah melalui pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif, maka RAPBD kemudian berubah menjadi APBD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, sedangkan penjabarannya di tuangkan dalam Keputusan Kepala Daerah. Berdasarkan di masukan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang merupakan perubahan DIKDA/DIPDA dalam sistem lama.(Arifin Sabeni, 2003 : 39).

2.5 Pengertian dan Tujuan Analisis Rasio Keuangan

a. Pengertian Analisis Rasio

analisis merupakan penyelidikan atau penelitian terhadap suatu peristiwa yang sebenarnya terjadi, sedangkan rasio adalah alat ukur perbandingan antara dua atau lebih aspek yang dinyatakan dalam angka. Jadi analisis rasio yaitu suatu penyelidikan atau penelitian terhadap suatu peristiwa atau kegiatan dengan melakukan perbandingan antara satu dengan yang lainnya yang dinyatakan dalam bentuk angka.

Berdasarkan uraian diatas, Sofyan Syafri Harahap (2002:194) mendefinisikan analisa rasio sebagai berikut :

Menguraikan pos–pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui

kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

S. Munawir (2004 : 37) mengemukakan pendapat mengenai pengertian analisa rasio adalah sebagai berikut :

Analisa rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos –pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi.

Sedangkan pendapat lain yang dikemukakan oleh Hermanto (2002 : 119) mengenai analisa rasio adalah :

Merupakan suatu teknik analisa yang banyak hal mampu memberikan petunjuk atau indikator dalam gejala–gejala yang timbul disekitar kondisi yang melingkupi

b. Tujuan Analisa Rasio Keuangan Daerah

Analisa rasio keuangan daerah dapat digunakan untuk :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya
4. Mengukur kontribusi masing–masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Menilai pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.6 Jenis Rasio Keuangan Daerah

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman dan lain-lain yang bersifat bukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Widodo, 2001 : 262).

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian: } \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern}}$$

Kriteria pengukurannya dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1

Skala Interval Kemampuan Keuangan Daerah

Persentase PAD	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 -30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Litbang Depdagri – fisipol UGM (Munir Dasril dkk , 2004 : 49)

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat

ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintahan pusat) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio keuangan juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

b. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

1. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Abdul Halim, 2002 : 177)

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target penerimaan PAD berdasarkan potensi riil}}$$

Kriteria pengukurannya dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2

Kriteria Kinerja Keuangan Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri tahun 2002

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian

semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah resiko yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara hemat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatannya kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterima. (Abdul Halim, 2002 : 178)

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}}$$

Kriteria pengukurannya dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Kriteria Kinerja Keuangan Efisiensi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien

80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri tahun 2002

c. Rasio Aktivitas

Rasio yang mengukur antara alokasi dana belanja rutin (Belanja Tidak Langsung) dan belanja pembangunan (Belanja Langsung) secara optimal. Rasio Belanja Pembangunan ditunjukkan oleh total belanja Pembangunan dibandingkan dengan total dari APBD Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat akan semakin besar. Secara sederhana rasio keserasian ini dapat diformulasikan sebagai berikut (Widodo, 2001 : 262) :

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} : \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Rutin} : \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

Kriteria pengukurannya dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4

Skala Interval Rasio Belanja Pembangunan

Persentase (%)	Kategori
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber : Anita Wulandari (2009: 22)

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai komponen penyusun APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, total pendapatan, belanja rutin dan belanja pembangunan (Widodo, 2001 : 270):

Rumus yang digunakan adalah :

$$r : \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n : Data yang dihitung pada tahun ke-n

P_o : Data yang dihitung pada tahun ke-0

r : Pertumbuhan

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Sejarah Singkat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang–undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009

Tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1951. Seruan pemekaran kembali dihembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu–satunya kewedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu. Dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juli 1999 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999. Perihal dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008,

Perihal dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti , Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16a tanggal 9 Juni 2008 perihal rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Gubernur Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 8 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pementukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 Pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. (Kepmendagri, 2008)

3.2 Potensi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2009 yaitu sebesar 6,59 persen, dibandingkan dengan tahun 2008 berkisar 7,34 persen. PDRB perkapita dan pendapatan regional per kapita tahun 2009 mengalami peningkatan. Atas dasar harga berlaku, PDRB per kapita tahun 2008 sebesar Rp. 20,67 juta menjadi Rp. 24,43 juta pada tahun 2009. atas dasar harga konstans 2000, PDRB per kapita tahun 2009 mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 6,13 juta pada tahun 2008 menjadi Rp. 6,46 juta pada tahun 2009. nilai ekspor dikabupaten Kepulauan Meranti hingga Desember 2009 mencapai US\$ 10.759.426. Nilai ekspor tersebut hanya dari Pelabuhan Selatpanjang. Nilai impor

Kabupaten Kepulauan Meranti selama 2009 mencapai US\$ 155.313 melalui Pelabuhan Selatpanjang.(Dinas pendapatan, 2010 : 19)

3.3 Bagian – Bagian Keuangan Daerah

A. Bagian Anggaran Daerah

Bagian Anggaran Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana anggaran rutin, mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan penyusunan APBD, memproses penyusunan RAPBD, pembahasan, mengkoreksi dan justifikasi Daftar Usulan Kegiatan (DUK) menjadi Daftar Isian kegiatan (DIKDA). Ikut meneliti, membahas, mengkoreksi dan justifikasi Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP) menjadi Daftar Isian (DIPDA) dan Lembaran Kerja (LK), meneliti, mengkoreksi dan jusifikasi usulan revisi/perubahan DIKDA/DIPDA/LK. Menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan APBD. Mempersipakan notaa keuangan yang akan disampaikan kepada DPRD Provinsi Riau, membuat petunjuk pelaksanaan APBD. Menyelenggarakan sistem informasi dan manajemen keuangan daerah (SIMKEUDA).

Bagian Anggaran Daerah terdiri dari :

1. Sub Bagian Anggaran Rutin
2. Sub Bagian Anggaran Pembangunan
3. Sub Bagian Anggaran Belanja Pegawai
4. Sub Bagian Penyusunan Anggaran Daerah dan SIMKEUDA

Uraian tugas dari masing – masing Bagian Anggaran Daerah adalah :

1. Sub Bagian Anggaran Rutin mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memproses penyusunan anggaran rutin. Pembahasan DUKDA dan revisi DIKDA. Penerbitan SKO. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan anggaran rutin, pengendalian dan pengawasan penggunaan anggaran rutin daerah.
2. Sub Bagian Anggaran Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memproses penyusunan anggaran pembangunan. Pembahasan DURDA dan revisi DIPDA. Penerbitan SKO, membuat petunjuk teknis pelaksanaan anggaran pembangunan, pengendalian dan pengawasan penggunaan anggaran pembangunan daerah.
3. Sub Bagian Anggaran Belanja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memproses penyusunan anggaran belanja pegawai. Pembahasan DUKDA dan revisi DIKDA. Penerbitan SKO, membuat petunjuk teknis pelaksanaan anggaran belanja pegawai, pengendalian dan pengawasan penggunaan anggaran belanja pegawai daerah.
4. Sub Bagian Penyusunan Anggaran Daerah dan SIMKEUDA mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan RAPBD dan perhitungan APBD sesuai dengan jadwal yang ditentukan pengendalian anggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi

APBD. Mengumpulkan bahan dan mengaplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah.

B. Bagian Perbendaharaan Daerah

Bagian pembendaharaan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pemeriksaan surat perintah penagihan/penerimaan menerbitkan surat perintah membayar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Melakukan pemeriksaan terhadap perlengkapan dan kebenaran/ketepatan administrasi anggaran yang akan dikeluarkan/diminta oleh Badan Daerah, Kantor Daerah dan Dinas Daerah. Memproses pengangkut/pemberhentian Bendaharawan dan atasan langsung Bendaharawan.

Bidang Pembendaharawan Daerah terbagi dari :

1. Sub Bagian Anggaran Rutin
2. Sub Bagian Anggaran Pembangunan
3. Sub Bangunan Belanja Pembangunan
4. Sub Bagian Pembinaan Bendaharawan.

Uraian tugas dari masing-masing Bagian Pembendaharaan Daerah adalah :

1. Sub Bagian Anggaran Rutin mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memeriksa surat perintah penagihan/penerimaan menerbitkan surat perintah membayar anggaran rutin sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran/ketepatan administrasi dan sasaran penggunaan anggaran rutin yang akan dikeluarkan oleh Badan Daerah, Kantor Daerah dan Dinas Daerah.

2. Sub Bagian Anggaran Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memeriksa surat perintah penagihan/penerimaan menerbitkan surat perintah membayar anggaran pembangunan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran/ketepatan administrasi dan sasaran penggunaan anggaran pembangunan yang akan dikeluarkan oleh Badan Daerah, Kantor Daerah dan Jenis Daerah.
3. Sub Bagian Anggaran belanja pegawai mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memeriksa surat perintah penagihan penerimaan menerbitkan surat perintah membayar anggaran belanja pegawai sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran/ketepatan administrasi dan sasaran pengguna anggaran belanja pegawai yang akan dikeluarkan oleh Badan Daerah, Kantor Daerah dan Dinas Daerah.
4. Sub Bagian Pembinaan Bendaharawan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memproses pengangkatan/pemberhentian. Bendaharawan dan atasan langsung Bendaharawan. Melakukan pembinaan terhadap bendaharawan dalam rangka meningkatkan kemampuannya, membuat dan menyampaikan petunjuk teknis bimbingan tugas bendaharawan. Melakukan evaluasi terhadap kinerja bendaharawan dilingkungan Pemerintah Daerah.

C. Bagian Verifikasi Keuangan Daerah

Bagian Verifikasi Keuangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan verifikasi terhadap penggunaan anggaran rutin dan pembangunan oleh Badan Daerah. Kantor Daerah dan Dinas Daerah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran/ketepatan administrasi dan sasaran penggunaan anggaran dan justifikasi terhadap kwintansi dan pembukuan penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Daerah, Kantor Daerah dan Dinas Daerah.

Bagian Verifikasi Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Sub Bagian Verifikasi Anggaran Rutin
2. Sub Bagian Verifikasi Anggaran Pembangunan
3. Sub Bagian Verifikasi Anggaran Belanja Pegawai

Uraian tugas dari masing-masing Bagian Verifikasi Keuangan Daerah adalah :

1. Sub bagian Verifikasi Anggaran Rutin mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan verifikasi terhadap penggunaan anggaran rutin oleh Badan Daerah, Kantor Daerah dan Dinas Daerah, melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran/ketepatan administrasi dan sasaran pengguna anggaran dan justifikasi terhadap kwintansi dan pembukuan penggunaan anggaran rutin yang telah dilaksanakan oleh Badan Daerah, Kantor Daerah dan Dinas Daerah.
2. Sub Bagian Verifikasi Anggaran Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan verifikasi terhadap penggunaan

oleh Badan Daerah, Kantor Daerah dan Dinas Daerah, melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran/ketepatan administrasi dan sasaran penggunaan anggaran dan justifikasi terhadap kwintansi dan pembukuan penggunaan anggaran pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Badan Daerah, Kantor Daerah dan Dinas Daerah.

3. Sub Bagian Verifikasi Anggaran Belanja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran/ketepatan administrasi dan sasaran penggunaan anggaran dan justifikasi terhadap kwintansi dan pembukuan pengguna Anggaran Belanja Pegawai yang telah dilaksanakan oleh Badan Daerah, Kantor Daerah dan Dinas Daerah.

D. Bagian Pembukuan Keuangan Daerah

Bagian Pembukuan Keuangan daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan berkenaan dengan pembukuan keuangan daerah, mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan perhitungan anggaran, menyelenggarakan tata usaha biro dan pelaporan keuangan daerah.

Bagian Pembukuan Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Sub Bagian Pembukuan Anggaran Rutin
2. Sub Bagian Pembukuan Anggaran Pembangunan
3. Sub Bagian Pembukuan Anggaran Belanja Pegawai

Uraian tugas dari masing-masing Bagian Pembukuan Keuangan Daerah adalah :

1. Sub Bagian Pembukuan Anggaran Pembukuan Anggaran Rutin mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan berkenaan dengan pembukuan belanja rutin. Mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan perhitungan anggaran belanja rutin.
2. Sub Bagian Pembukuan Anggaran Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan berkenaan dengan pembukuan belanja pembangunan, mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran belanja pembangunan.
3. Sub Bagian Pembukuan Anggaran Belanja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan berkenaan dengan pembukuan belanja pegawai, mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan perhitungan anggaran belanja pegawai
4. Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan fungsi Biro Keuangan Daerah (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum), mempersiapkan bahan-bahan dan membuat laporan keuangan daerah sesuai dengan sifat keperluannya.

E. Bagian Kas Daerah

Bagian Kas Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.

Bagian Kas Daerah terdiri dari :

1. Sub Bagian Penerimaan
2. Sub Bagian Pengeluaran

Uraian tugas dari masing–masing Bagian Kas adalah :

1. Sub Bagian Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan berkenaan dengan penerimaan keuangan daerah.
2. Sub Bagian Pengeluaran mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan berkenaan dengan pengeluaran keuangan Daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk membuat suatu gambaran tentang kinerja keuangan pemerintah daerah kita harus mengetahui APBD pemerintah daerah, yang meliputi perhitungan APBD tahunan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan oleh kantor Bupati dan kantor Dinas Pendapatan, Keuangan Daerah dan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang.

Data yang dikumpulkan berupa APBD pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2010 dan tahun anggaran 2011 yang diolah dengan melakukan Analisis Rasio Keuangan yang digunakan untuk mengukur Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Aktifitas, dan Rasio pertumbuhan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

4.1 Hasil Penelitian

Berikut ini adalah hasil penelitian dari masing-masing rasio keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti :

4.1.1 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan dari pemerintah pusat ataupun pinjaman.

Rasio Kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keuangan

daerah dapat mendukung otonomi daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Berikut ini akan digambarkan gambaran pendapatan daerah pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2010 dan tahun anggaran 2011.

Tabel 4.1
Gambaran Pendapatan Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun Anggaran 2010
(dalam rupiah)

No	Uraian Pendapatan	Anggaran	Realisasi
1.1	Pendapatan Asli Daerah		
1.1.1	Pendapatan Pajak daerah	1.644.440.676	1.257.280.332
1.1.2	Pendapatan Retribusi daerah	2.329.871.574	1.102.505.784
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-
1.1.4	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.367.767.000	3.791.566.752
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		6.342.079.250	6.151.352.868
1.2	Dana Perimbangan		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	336.381.316.988	375.776.277.169
1.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	8.032.100.000	6.024.075.000
Dana Perimbangan		344.413.416.988	381.800.352.169
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1.3.1	Pendapatan Daerah	18.500.000.000	16.354.455.644
1.3.2	Dana Darurat	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya	19.565.031.500	13.168.078.715
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7.000.000.000	7.000.000.000
1.3.6	Dana Penyeimbang	82.619.711.800	82.673.636.800
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		127.684.743.300	119.196.171.159
Jumlah Pendapatan Daerah		478.440.239.538	507.147.876.196

Sumber Data : APBD Kabupaten Kepulauan Meranti

Tabel 4.2
Gambaran Pendapatan Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun Anggaran 2011
(dalam rupiah)

No	Uraian Pendapatan	Anggaran	Realisasi
1.1	Pendapatan Asli Daerah		
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.000.000.000	2.544.320.678
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.600.000.000	1.914.775.543
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
1.1.4	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah	12.500.000.000	18.473.420.366
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		19.000.000.000	22.942.512.587
1.2	Dana Perimbangan		
1.2.1	Pendapatan Retribusi Daerah	95.833.012.273	70.920.066.172
1.2.2	Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak sumber Daya alam	448.355.391.545	441.421.405.476
1.2.3	Dana Alokasi Umum	240.239.822.000	240.293.820.000
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	45.312.800.000	12.500.000.000
Jumlah Dana Perimbangan		829.795.025.818	786.619.891.648
1.3	Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1.3.1	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-
Jumlah Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah		-	-
1.4	Dana Bagi Hasil dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya		
1.4.1	Dana Bagi Hasil dari Propinsi	31.354.185.990	22.486.717.477
Jumlah Bagi Hasil dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		31.354.185.990	22.486.717.477
1.5	Dana Penyesuaian		
1.5.1	Dana Ad Hoc	-	-
1.5.2	Dana Peningkatan Infrastruktur Daerah (BPID)	24.750.000.000	7.425.000.000
1.5.3	Dana Bos	14.361.001.000	14.361.001.000
1.5.4	Dana Tunjangan Profesi Guru	10.283.362.320	7.712.523.000
1.5.5	Dana Tambahan Penghasilan Guru	4.119.750.000	3.089.814.000
1.5.6	Transfer DPPIP	5.870.703.000	2.935.351.500
Jumlah Dana Penyesuaian		59.384.816.320	35.523.689.500
1.6	Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1.6.1	Bantuan Keuangan dari Propinsi	231.000.000	231.000.000
1.6.2	Bantuan Keuangan dari Kabupaten / Kota	-	-
1.6.3	Bantuan Keuangan Untuk Desa	-	438.000.000
Jumlah Bantuan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		231.000.000	669.000.000
Jumlah Pendapatan		939.765.028.128	868.241.811.212

Sumber Data : APBD Kabupaten Kepulauan Meranti

Berikut perhitungan APBD pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah :

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian: } \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern}}$$

Kriteria pengukurannya dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini :

Tabel 4.3

Skala Interval Kemampuan Keuangan Daerah

Persentase PAD	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 -30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Litbang Depdagri – fisipol UGM (Munir Dasril dkk , 2004 : 49)

a. Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2010 = $\frac{6.151.352.868.}{500.996.523.328} = 1.2 \%$

b. Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2011 = $\frac{22.942.512.587}{855.299.298.625} = 2,7 \%$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dari sejak disahkan APBD nya pada tahun 2010 sampai pada tahun 2011 berada pada kriteria sangat kurang yaitu 1.2 % pada tahun 2010 dan 2,7 % pada tahun 2011 . Hal ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kurang .

4.1.2 Analisis Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

a. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Berikut ini akan digambarkan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Keuangan Daerah dan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2010 dan tahun anggaran 2011.

Tabel 4.4
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun Anggaran 2010
(dalam rupiah)

No	Uraian Pendapatan	Rencana	Realisasi
1.1	Pendapatan Asli Daerah		
1.1.1	Pendapatan Pajak daerah	1.644.440.676	1.257.280.332
1.1.2	Pendapatan Retribusi daerah	2.329.871.574	1.102.505.784
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-
1.1.4	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.367.767.000	3.791.566.752
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		6.342.079.250	6.151.352.868

Sumber Data : APBD Kabupaten Kepulauan Meranti

Tabel 4.5
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun Anggaran 2011
(dalam rupiah)

No	Uraian Pendapatan	Rencana	Realisasi
1.1	Pendapatan Asli Daerah		
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.000.000.000	2.544.320.678
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.600.000.000	1.914.775.543
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
1.1.4	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah	12.500.000.000	18.473.420.366
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		19.000.000.000	22.942.512.587

Sumber Data : APBD Kabupaten Kepulauan Meranti

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD ditetapkan berdasarkan potensi riil}}$$

Kriteria pengukurannya dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini :

Tabel 4.6

Kriteria Kinerja Keuangan Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri tahun 2002

$$\text{Rasio Efektifitas Tahun Anggaran 2010} = \frac{6.151.352.868}{6.342.079.250} = 97 \%$$

$$\text{Rasio Efektifitas Tahun Anggaran 2011} = \frac{22.942.512.587}{19.000.000.000} = 120 \%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Rasio Efektifitas pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2010 sebesar 97 % berdasarkan Kriteria pengukuran dari Depdagri, Kepmendagri tahun 2002 maka Rasio Efektifitas Tahun Anggaran 2010 berada dikategori Efektif, Hal ini berbeda dengan tahun anggaran 2011 rasio efektifitas pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami kenaikan yaitu sebesar 120% berdasarkan Kriteria pengukuran Dari Depdagri, Kepmendagri tahun 2002 maka Rasio Efektifitas tahun anggaran 2011 berada dikategori sangat Efektif.

b. Rasio efisiensi

Rasio efisiensi adalah resiko yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara hemat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatannya kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya. Berikut ini akan digambarkan Biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Keuangan Daerah dan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2010 dan Tahun anggaran 2011.

Tabel 4.7
Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun Anggaran 2010

Nomor Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.20.1.20.06.17.034	Orientasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah dalam Rangka Peningkatan sumber –sumber Pendapatan Daerah		
1.20.1.20.06.17.034.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	355.600.000	181.400.000
1.20.1.20.06.30.005	Penagihan dan Verifikasi PAD		
1.20.1.20.06.30.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000	1.150.000
1.20.1.20.06.30.005.5.2.1.11.01	Belanja Makan dan Minuman Rapat	750.000	750.000
1.20.1.20.06.30.005.5.2.1.15.01	Belanja Perjalanan Dalam Daerah	170.900.000	63.565.000
1.20.1.20.06.30.009	Pendataan Wajib Wajak/ Retribusi Daerah yang Baru		
1.20.1.20.06.30.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000	2.850.000
1.20.1.20.06.30.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000	3.500.000
1.20.1.20.06.30.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	98.190.000	93.040.000
1.20.1.20.06.30.010	Survei sumber – sumber PAD		
1.20.1.20.06.30.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000	1.000.000
1.20.1.20.06.30.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah	24.320.000	12.700.000
1.20.1.20.06.30.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.815.000	47.070.000
1.20.1.20.06.30.011	Publikasi Peningkatan PAD		
1.20.1.20.06.30.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000	900.000
1.20.1.20.06.30.011.5.2.2.01.14	Belanja Pembuatan Spanduk, Brosur dn Leaflet	19.500.000	19.305.000
1.20.1.20.06.30.011.5.2.3.26.35	Belanja Modal konstruksi / Pembelian Baliho	150.000.000	-
Jumlah		885.525.000	477.230.000

Sumber Data : APBD Kabupaten Kepulauan Meranti

Tabel 4.8
Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun Anggaran 2011

No	Uraian	Realisasi
1	Kegiatan Pemantauan Objek Pemasangan Reklame	197.700.000
2	Kegiatan Pemantauan Objek Pajak Sarang Burung Walet	221.770.000
3	Kegiatan Pemuktakhiran data Pendataan Wajib Pajak / Retribusi Daerah	122.365.000
4	Kegiatan Rapat – rapat Monitoring, Evaluasi PAD dan Target PAD	179.942.750
5	Kegiatan Penagihan dan Verifikasi PAD	121.860.000
6	Kegiatan Publikasi Peningkatan PAD	216.750.000
7	Kegiatan Sosialisasi Peraturan pajak dan Retribusi Daerah	139.532.450
Jumlah		1.199.920.200

Sumber Data : APBD Kabupaten Kepulauan Meranti

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}}$$

Kriteria pengukurannya dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini :

Tabel 4.9
Kriteria Kinerja Keuangan Efisiensi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri tahun 2002

$$\text{Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2010} = \frac{477.230.000}{6.151.352.868} = 7,7 \%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2011} = \frac{1.199.920.200}{22.942.512.587} = 5.2 \%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Rasio Efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Pada tahun anggaran 2010 dan 2011 sebesar 7,7 % dan 5.2 % berdasarkan Kriteria pengukuran dari Depdagri,

Kepmendagri tahun 2002 maka Rasio Efektifitas tahun anggaran 2010 berada dikategori Sangat Efisien.

4.1.3 Rasio Aktifitas

Rasio yang mengukur antara alokasi dana belanja rutin (Belanja Tidak Langsung) dan belanja pembangunan (Belanja Langsung) secara optimal. Rasio Belanja Pembangunan ditunjukkan oleh total belanja Pembangunan dibandingkan dengan total dari APBD Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat akan semakin besar. Berikut ini akan digambarkan Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2010 dan tahun anggaran 2011.

Tabel 4.10
Gambaran Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun Anggaran 2010

No.	Uraian	Setelah Perubahan	Realisasi
5	Belanja Daerah	473.791.677.519	368.699.036.594
5.1	Belanja Tidak Langsung	254.189.299.486	194.226.284.749
5.1.1	Belanja Pegawai	208.110.843.489	150.572.427.965
5.1.2	Belanja Bunga		
5.1.3	Belanja Subsidi		
5.1.4	Belanja Hibah	12.209.211.570	12.022.853.984
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.159.244.427	9.556.022.800
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	22.710.000.000	21.985.000.000
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	80.000.000.000
5.2	Belanja Langsung	219.602.378.032	174.479.523.405
5.2.1	Belanja Pegawai	47.589.993.444	37.979.687.078
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	105.898.318.102	82.894.564.680
5.2.3	Belanja Modal	66.114.066.576	53.605.271.647

Sumber Data : APBD Kabupaten Kepulauan Meranti

Tabel 4.11
Gambaran Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun Anggaran 2011

No.	Uraian	Setelah Perubahan	Realisasi
5	Belanja Daerah	1.063.808.776.817	817.740.061.027
5.1	Belanja Tidak Langsung	420.889.824.448	308.671.361.520
5.1.1	Belanja Pegawai	339.775.149.956	263.885.022.520
5.1.4	Belanja Hibah	15.990.139.000	6.965.139.000
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	21.812.500.000	15.812.500.000
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	40.812.675.000	20.675.000.000
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.675.035.492	1.333.700.000
5.2	Belanja Langsung	642.918.952.369	509.068.699.507
5.2.1	Belanja Pegawai	81.498.043.513	60.715.617.654
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	245.016.928.102	160.965.002.340
5.2.3	Belanja Modal	316.403.980.754	287.388.079.513

Sumber Data : APBD Kabupaten Kepulauan Meranti

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} : \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Rutin} : \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

Kriteria pengukurannya dapat dilihat pada tabel 4.12 dibawah ini :

Tabel 4.12
Skala Interval Rasio Belanja Pembangunan

Persentase (%)	Kategori
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber : Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Pembangunan (LPEP)

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2010} : \frac{174.479.523.405}{368.699.036.594} = 47 \%$$

$$\text{Rasio Belanja Rutin Tahun Anggaran 2010} : \frac{194.226.284.749}{368.699.036.594} = 53 \%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2011} : \frac{509.068.699.507}{817.740.061.027} = 62 \%$$

$$\text{Rasio Belanja Rutin Tahun Anggaran 2011} : \frac{308.671.361.520}{817.740.061.027} = 38 \%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Rasio Belanja Pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun anggaran 2010 sebesar 47 % berdasarkan Kriteria pengukuran dari Anita Wulandari (2001: 22) maka Rasio Belanja Pembangunan tahun anggaran 2010 berada dikategori Baik. Pada tahun anggaran 2011 mengalami peningkatan yang sangat signifikan karena pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mengalokasikan Belanja Pembangunannya sebesar 62 % berdasarkan Kriteria pengukuran dari Anita Wulandari (2001: 22) maka Rasio Belanja Pembangunan tahun anggaran 2011 berada dikategori Sangat Baik.

4.1.4 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai komponen penyusun APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), total pendapatan, belanja pembangunan dan belanja rutin.

Rumus yang digunakan adalah :

$$r : \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n : Data yang dihitung pada tahun ke-n

P_o : Data yang dihitung pada tahun ke-0

r : Pertumbuhan

a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{22.942.512.587 - 6.151.352.868}{6.151.352.868} = 273 \%$$

Dari perhitungan diatas Rasio Pertumbuhan PAD antara tahun anggaran 2010 dan 2011 pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 273 % dibandingkan dengan tahun 2010.

b. Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan

$$\text{Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan} = \frac{868.241.811.212 - 507.147.876.196}{507.147.876.196} = 71 \%$$

Dari perhitungan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan diatas diketahui bahwa total pendapatan tahun anggaran 2011 pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti meningkat sebesar 71 % dibandingkan dengan tahun anggaran 2010.

c. Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan Total Belanja Pembangunan} &= \frac{509.068.699.507 - 174.479.523.405}{174.479.523.405} \\ &= 192 \% \end{aligned}$$

Dari perhitungan Rasio Pertumbuhan Total Belanja Pembangunan diatas diketahui bahwa total belanja pembangunan tahun anggaran 2011 pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti meningkat sebesar 192 % dibandingkan dengan tahun anggaran 2010.

d. Rasio Pertumbuhan Total Belanja Rutin

$$\text{Rasio Pertumbuhan Total Belanja Rutin} = \frac{308.671.361.520 - 194.226.284.749}{194.226.284.749} = 59 \%$$

Dari perhitungan Rasio Pertumbuhan Total belanja Rutin diatas diketahui bahwa total belanja rutin tahun anggaran 2011 pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti meningkat sebesar 59 % dibandingkan dengan tahun anggaran 2010.

4.2 Pembahasan

Berikut adalah rekapitulasi Rasio keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2010 dan 2011 :

Rekapitulasi Rasio Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Tahun Anggaran 2010 dan 2011

Tahun	Rasio Kemandirian		Rasio Efektifitas		Rasio Efisiensi		Rasio Aktivitas	
	Persen %	Kriteria	Persen %	Kriteria	Persen %	Kriteria	Persen %	Kriteria
2010	1,2 %	Sangat kurang	97 %	Efektif	7,7 %	Sangat efisien	47 %	Baik
2011	2,7 %	Sangat kurang	12 %	Sangat efektif	5,2 %	Sangat efisien	62 %	Sangat baik

Dari rekapitulasi rasio diatas didapat pembahasan dari masing-masing rasio keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

4.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan

Dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan tahun anggaran 2010 dan 2011 dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berada di kriteria sangat kurang . Hal ini membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat tergantung kepada sumber lain (pihak ektern) . Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tidak memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar untuk membiayai APBD nya. Walaupun dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kurang, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki sumber daya alam seperti Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dikelola oleh PT. Condur Petroleum yang memberikan kontribusi pajak yang besar kepada pemerintah pusat sehingga Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah pusat menjadi besar sehingga APBD Kabupaten Kepulauan Meranti terus meningkat sampai tahun anggaran 2012 ini APBD pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai 1,3 Triliun.

4.2.2 Rasio Efektifitas dan Efisiensi

1. Rasio Efektifitas

Dari hasil perhitungan Rasio Efektifitas pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Tahun Anggaran 2010 sebesar 96 % berdasarkan Kriteria pengukuran dari Depdagri, Kepmendagri tahun 2002 maka Rasio

Efektifitas Tahun Anggaran 2010 berada dikategori Efektif, hal ini membuktikan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2010 efektif dalam merealisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Hal ini berbeda dengan tahun anggaran 2011 rasio efektifitas pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami kenaikan sebesar 120% berdasarkan Kriteria pengukuran dari Depdagri, Kepmendagri tahun 2002 maka Rasio Efektifitas Tahun Anggaran 2011 berada dikategori sangat Efektif, hal ini membuktikan bahwa kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu masih berada dikategori efektif.

2. Rasio Efisiensi

Dari hasil perhitungan Rasio Efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Tahun Anggaran 2010 dan 2011 sebesar 6,9 % dan 5.2% berdasarkan Kriteria pengukuran dari Depdagri, Kepmendagri tahun 2002 maka Rasio Efektifitas Tahun Anggaran 2010 berada di kriteria Sangat Efisien, hal ini membuktikan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun anggaran 2010 dan 2011 Sangat Efisien dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

4.2.3 Rasio Aktivitas

Dari hasil perhitungan Rasio Belanja Pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Tahun Anggaran 2010 sebesar 49 %

berdasarkan Kriteria pengukuran dari Anita Wulandari (2001: 22) maka Rasio Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2010 berada di kriteria Baik, hal ini membuktikan bahwa alokasi dana belanja daerah pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Baik dalam mengalokasikan belanja daerahnya karena telah mengalokasikan belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2011 mengalami peningkatan yang sangat signifikan karena pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mengalokasikan Belanja Pembangunannya sebesar 62 % dibandingkan dengan Belanja Rutin sehingga diharapkan sarana prasarana ekonomi masyarakat menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

4.2.4 Rasio Pertumbuhan

1. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diketahui bahwa total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2011 meningkat sebesar 273 % dibandingkan dengan tahun anggaran 2010, hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi daerah mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti semakin tinggi

2. Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan

Dari perhitungan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan dapat diketahui bahwa total pendapatan tahun anggaran 2011 meningkat sebesar 71 % dibandingkan dengan tahun anggaran 2010. Hal ini membuktikan bahwa

partisipasi masyarakat pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan bantuan dari Pemerintah Pusat meningkat secara signifikan.

3. Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

Dari perhitungan Rasio Pertumbuhan Total Belanja Pembangunan dapat diketahui bahwa total belanja pembangunan tahun anggaran 2011 meningkat sebesar 192 % dibandingkan dengan tahun anggaran 2010. Hal ini membuktikan bahwa alokasi belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin meningkat.

4. Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin

Dari perhitungan Rasio Pertumbuhan Total belanja Rutin dapat diketahui bahwa total belanja rutin tahun anggaran 2011 meningkat sebesar 59 % dibandingkan dengan tahun anggaran 2010. Hal ini membuktikan bahwa alokasi belanja rutin yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat meningkat secara signifikan.

Dari hasil Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Daerah, Belanja Pembangunan dan Belanja Rutin pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan pertumbuhan yang positif karena mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menggunakan analisis Rasio keuangan yang terdiri dari Rasio Kemandirian Keuangan daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Dari hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada kategori sangat kurang dalam Kemandirian Keuangan namun pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat berpotensi untuk mensejahterakan masyarakatnya karena mempunyai sumber daya alam yang besar
- b.
- c. Rasio Efektivitas pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti semakin meningkat yaitu pada tahun anggaran 2010 berada pada kategori efektif meningkat menjadi sangat efektif pada tahun anggaran 2011.
- d. Rasio efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat efisiensi dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- e. Kondisi rasio aktivitas pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar sudah diprioritaskan untuk kebutuhan belanja pembangunan

- f. Pertumbuhan APBD pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan meranti yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), total pendapatan, belanja rutin dan belanja pembangunan menunjukkan pertumbuhan yang positif

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kinerja keuangan daerah pada APBD pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran pada kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada masa yang akan datang. Adapun saran tersebut adalah :

- a. Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan harus berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya sehingga tidak bergantung lagi dari Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah pusat.
- b. Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan analisis rasio keuangan daerah pada APBD dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
- c. Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mengetahui pertumbuhan-pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dan dapat mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu menjadi perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surat Al- Baqarah 282

Andrew, Mac Colin, 2001, Hubungan antara pusat – Daerah menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Anita Wulandari, 2009, Kemampuan Keuangan Daerah, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol 7 No 3 November

Baswir, Revrison, 2003, Akuntansi Pemerintah Daerah Indonesia, Edisi Ke tujuh, BPFE, Yogyakarta

Dasril Munir dkk, 2003, Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah, YPAPI, Yogyakarta

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Potensi Ekonomi, 2010

Elmi, 2007, Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi Di Indonesia

Gaffar, Rasyid dan Syaukani, 2008, Otonomi Daerah Dalam Negeri Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Hermanto, Analisa Laporan Keuangan, Edisi Keenam, Cetakan Kedua, STIE YKPN, Yogyakarta

Halim, Abdul, 2002, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Satu, Salemba Empat, Jakarta

Kast,Fremont E dan Rosenweigh James E. Organisasi dan Manajemen, Jilid I dan 2, Diterjemahkan oleh A. Hasyim Ali, Bumi Askara, Jakarta

Kepmendagri No 29 Tahun 2002, Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan, Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kepmendagri, 2008, Undang-Undang Pemerintahan

Koswara, 2008, Peranan Administrasi Dalam Penyusunan Daerah, Widjaya Praja, HP, Yogyakarta

Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Edisi pertama, Cetakan pertama, Yogyakarta

Muhammad Rifki, 2008, Akuntansi Keuangan Syariah, P3EI, Press, Jakarta

Munawir S, 2004, Analisa Laporan Keuangan, Edisi Ketujuh, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta

PP No. 15 Tahun 2000, Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah

Sabeni, Arifin, Pokok- pokok Akuntansi Pemerintahan, Edisi Ketujuh, BPFE, Yogyakarta

Syofyan Syafri Harahap, 2002, Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan, Edisi Dua, Cetakan Tiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

UU. No. 32 dan No. 33 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan

Widodo, 2001, Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP YKPN